



## **Relasi Patron–Klien Dalam Kontestasi Pilkada 2024: Analisis Partisipasi Politik Masyarakat Hinterland**

### ***Patron-Client Relations in the 2024 Regional Election Contest: An Analysis of Hinterland Community Political Participation***

Linayati Lestari<sup>1</sup>, Nabila Aulia Putri<sup>2</sup>, Sarah Meilina<sup>3</sup>, Sri Langgeng Ratnasari<sup>4</sup>,  
Fera Darmayanti<sup>5</sup>, Farah Syoraya<sup>6</sup>, Hirose Purnama Cahyani<sup>7</sup>, Anggit Wahyu Wichaksono<sup>8</sup>,  
Adelia Suharman<sup>9</sup>, Roy Marito Daulay<sup>10</sup>

<sup>1-3</sup>*Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau Kepulauan, Indonesia*

<sup>4,5</sup>*Prodi Magister Manajemen, Program Pascasarjana, Universitas Riau Kepulauan, Indonesia*

<sup>6</sup>*Prodi Magister Manajemen Pendidikan, Program Pascasarjana, Universitas Riau Kepulauan, Indonesia*

<sup>7</sup>*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan, Indonesia*

<sup>8</sup>*Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau Kepulauan, Indonesia*

<sup>9</sup>*Prodi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Riau Kepulauan, Indonesia*

<sup>10</sup>*Prodi Sistem Informasi, Fakultas Teknik, Universitas Riau Kepulauan, Indonesia*

e-mail: [linayati@fisip.unrika.ac.id](mailto:linayati@fisip.unrika.ac.id)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan menganalisis relasi *patron–klien* serta pengaruhnya terhadap partisipasi politik masyarakat hinterland pada Pilkada 2024 di Kelurahan Bulang Lintang, Kecamatan Bulang, Kota Batam. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi *patron–klien* terbentuk melalui kedekatan sosial, bantuan ekonomi, pemberian dukungan material, serta pengaruh tokoh masyarakat dalam mobilisasi politik. Relasi tersebut berpengaruh terhadap tingginya tingkat partisipasi politik masyarakat Kecamatan Bulang yang mencapai 72,28%, lebih tinggi dibandingkan tingkat partisipasi Kota Batam sebesar 46,76%. Selain meningkatkan partisipasi politik, hubungan *patron–klien* juga membentuk perilaku politik masyarakat yang cenderung pragmatis dan transaksional. Dukungan politik masyarakat lebih banyak dipengaruhi oleh loyalitas, kedekatan personal, dan kepentingan sosial ekonomi dibandingkan pertimbangan programatik. Penelitian ini juga menemukan bahwa pengaruh *patron* masih kuat dalam menentukan pilihan politik masyarakat serta membentuk kelompok dukungan politik dalam dinamika Pilkada 2024 di wilayah *hinterland*.

**Kata Kunci:** Patronase; Partisipasi; Hinterland; Pilkada; Politik

### **Abstract**

*This study aims to analyze patron–client relations and their influence on the political participation of hinterland communities in the 2024 regional election in Bulang Lintang Village, Bulang*

*District, Batam City. The study employed a descriptive qualitative method with data collection techniques through interviews, observations, and documentation. Data analysis was conducted using the Miles and Huberman model through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results show that patron–client relations were formed through social closeness, economic assistance, material support, and the influence of community leaders in political mobilization. These relations contributed to the high level of political participation in Bulang District, which reached 72.28%, higher than the political participation rate of Batam City at 46.76%. In addition to increasing political participation, patron–client relations also shaped political behavior that tended to be pragmatic and transactional. Community political support was more influenced by loyalty, personal closeness, and socio-economic interests rather than programmatic considerations. This study also found that the influence of patrons remains strong in determining community political choices and in forming political support groups within the dynamics of the 2024 regional election in hinterland areas.*

**Keywords:** Patronage; Participation; Hinterland; Election; Politics

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara demokrasi yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip demokrasi tersebut diwujudkan melalui pemilihan umum sebagai sarana penyaluran kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin dan wakil rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali sesuai Pasal 22E UUD 1945. Pemilu menjadi mekanisme penting dalam sistem demokrasi karena berfungsi sebagai proses pergantian kepemimpinan dan legitimasi politik pemerintahan (Alpikri & Lestari, 2017).

Salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi di tingkat lokal adalah Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) yang dilaksanakan secara langsung sejak tahun 2005 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Oleh sebab itu, partisipasi politik tidak hanya dipandang sebagai hak konstitusional masyarakat, tetapi juga menjadi indikator kualitas demokrasi suatu negara (Budiardjo, 2019).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 1 Ayat (6), pemilih adalah warga negara yang berusia minimal 17 tahun atau sudah/ pernah menikah dan terdaftar dalam pemilihan. Dengan demikian, partisipasi politik dalam Pilkada dibatasi pada warga yang memenuhi syarat administratif, yakni tercantum dalam DPT, Daftar Pemilih Pindahan (DPPH), atau Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), serta memiliki KTP sesuai domisili atau telah mengurus pindah memilih sesuai prosedur hukum. Partisipasi politik masyarakat menjadi indikator penting dalam menilai kualitas demokrasi, khususnya dalam Pilkada. Tingginya partisipasi menunjukkan kepedulian dan keterlibatan warga dalam proses politik. Namun, pada Pilkada Serentak 9 Desember 2015, tingkat partisipasi pemilih di Kota Batam hanya mencapai 50,65%, masih di bawah target nasional Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar 77,5%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat keterlibatan masyarakat dalam Pilkada di Batam saat itu masih relatif rendah.

**Tabel 1**

**Nama Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam Tahun 2024**

No.	Nama Pasangan Calon	Partai Pendukung
1.	Amsakar Achmad – Li Claudia Chandra	Partai Nasdem Partai Demokrat Partai Golongan Karya Partai Amanat Nasional Partai Keadilan Sejahtera Partai Hati Nurani Rakyat Partai Kebangkitan Bangsa Partai Solidaritas Indonesia Partai Kebangkitan Nusantara Partai Gerakan Indonesia Raya Partai Persatuan Pembangunan Partai Buruh
2.	Nuryanto – Hardi Selamat Hood	Partai gelombang Rakyat Indonesia Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Sumber: KPU Kota Batam, 2026

**Tabel 2**

**Jumlah Daftar Pemilih Tetap Masyarakat Kota Batam pada Pilkada Tahun 2015**

No.	Kecamatan	TPS	Jumlah DPT			Jumlah Pemilih yang Menggunakan Hak Pilih	Persentase Hak Pilih Per Kecamatan
			L	P	Total		
1.	Batam Kota	244	45.562	45.562	45.562	45.562	45.562
2.	Batu Aji	220	37.435	37.657	75.092	33.675	44.84%
3.	Batu Ampar	96	21.718	20.208	41.926	19.380	46.22%
4.	Belakang Padang	47	7.919	8.055	15.974	9.390	58.78%
5.	Bulang	24	3.958	3.606	7.564	5.025	66.43%
6.	Galang	45	5.838	4.998	10.836	8.008	73.90%
7.	Bengkong	177	34.414	33.342	67.756	30.687	45.29%
8.	Lubuk Baja	130	26.937	26.576	53.513	20.916	39.09%
9.	Nongsa	103	21.186	19.074	40.260	19.974	49.61%
10.	Sagulung	252	58.156	52.126	110.282	54.104	49.06%
11.	Sei Beduk	143	21.841	21.698	43.539	23.678	54.38%
12.	Sekupang	157	36.977	35.986	72.963	40.920	56.08%
	Total	1.638	321.941	309.516	631.457	309.468	49.01%

Sumber: KPU Kota Batam, 2026

Pada Pilkada Kota Batam 2015, dari 631.457 pemilih yang terdaftar dalam DPT, hanya 309.468 orang (49,01%) yang menggunakan hak pilihnya. Angka ini menunjukkan bahwa kurang dari separuh pemilih berpartisipasi aktif. Tingkat partisipasi tertinggi tercatat di Kecamatan Galang (73,90%), disusul Bulang (66,43%) dan Belakang Padang (58,78%). Sebaliknya, partisipasi terendah terdapat di Lubuk Baja (39,09%), Batu Aji (44,84%), dan Bengkong (45,29%). Rendahnya partisipasi tersebut dipengaruhi oleh minimnya sosialisasi, kurangnya sinergi antar lembaga, serta sikap apatis pemilih yang merasa tidak ada kandidat yang menarik. Pada Pilkada 2020, pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih memperoleh 267.497 suara atau 73,1% dari total suara sah, yang mencerminkan dukungan mayoritas pemilih yang berpartisipasi. Namun, pada Pilkada 2024, tingkat partisipasi di Kota Batam justru menurun drastis menjadi 46,76%. Dari 899.666 pemilih dalam DPT, hanya 420.694 orang yang menggunakan hak pilih. Capaian ini menjadi yang terendah sepanjang pelaksanaan pemilu dan pemilihan di Batam. Tingkat partisipasi pemilih merupakan indikator penting dalam menilai kualitas demokrasi dan legitimasi hasil pemilihan. Di Kecamatan Bulang terdapat 25 TPS yang terdiri dari 6 Kelurahan yaitu, Kelurahan Pulau Bukuh 5 TPS, Kelurahan Bulang Lintang 4 TPS, Kelurahan Batu Legong 3 TPS, Kelurahan Temoyong 3 TPS, Kelurahan Pantai Gelam 3 TPS, Kelurahan Setokok 7 TPS. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3**  
**Jumlah Daftar Pemilih Tetap Kecamatan Bulang**

No.	Kelurahan	TPS	Jumlah Pemilih		
			L	P	Total
1.	Pulau Buluh	5	1.123	1.054	2.177
2.	Bulang Lintang	4	654	620	1.274
3.	Batu Legong	3	484	410	894
4.	Temoyong	3	543	509	1.052
5.	Pantai Gelam	3	416	394	810
6.	Setokok	7	1.206	1.113	2.319

Sumber: KPU Kota Batam, 2026

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Bulang Lintang, Kecamatan Bulang. Partisipasi masyarakat dalam Pilkada pada 27 November 2024 merupakan wujud keterlibatan warga dalam menentukan pemimpin untuk lima tahun ke depan. Di Kelurahan Bulang Lintang terdapat 4 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 1.274 orang, terdiri dari 654 pemilih laki-laki dan 620 pemilih perempuan. Rincian jumlah pemilih tersebut disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 4**  
**Rekapitulasi Data pemilih Tetap**

No.	Nomor TPS	Jumlah Pemilih		
		L	P	Total
1.	1	200	200	400
2.	2	114	107	221
3.	3	302	280	582
4.	4	38	33	71
TOTAL		654	620	1.274

Sumber: KPU Kota Batam, 2026

Pada 27 November 2024, masyarakat Kecamatan Bulang yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam. Proses pemungutan suara berlangsung mulai pukul 07.00 hingga 13.00 WIB. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam, pemilihan tersebut diikuti oleh dua pasangan calon untuk masing-masing kontestasi, dengan perolehan suara sebagai berikut:

**Tabel 5**  
**Rekapitulasi Suara Calon Gubernur dan Wakil Gubernur**

Paslon	Nama Pasangan Calon	Suara
1	Ansar Ahmad – Nyanyang Haris Pratamura	3.141
2	Muhammad Rudi – Aunur Rafiq	2.787

Sumber: KPU Kota Batam, 2026

Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU di wilayah Kecamatan Bulang, pasangan calon nomor urut 01, Ansar Ahmad dan Nyanyang Haris Pratamura, memperoleh suara terbanyak dengan total 3.141 suara. Sementara itu, pasangan Muhammad Rudi dan Aunur Rafiq meraih 2.787 suara.

**Tabel 6**  
**Rekapitulasi Suara Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam**

Paslon	Nama Pasangan Calon	Suara
1	Nuryanto – Hardi Selamat Hood	1.244
2	Amsakar Achmad – Li Claudia Chandra	4.636

Sumber: KPU Kota Batam, 2026

Berdasarkan data perolehan suara Pilkada Batam 2024, pasangan calon nomor urut 02, Amsakar Achmad dan Li Claudia Chandra, memperoleh suara terbanyak dengan 4.636 suara, sedangkan pasangan nomor urut 01, Nuryanto dan Hardi Selamat Hood, memperoleh 1.244 suara. Dengan hasil tersebut, pasangan nomor urut 02 berhak menjabat sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam periode 2025–2030. Fenomena relasi *patron–klien* menjadi penting dianalisis dalam konteks wilayah *hinterland* seperti Kelurahan Bulang Lintang, Kecamatan Bulang. Wilayah *hinterland* umumnya memiliki keterbatasan akses informasi, infrastruktur, dan pembangunan

sosial-ekonomi, sehingga masyarakat lebih bergantung pada patron politik dan jaringan sosial berbasis kedekatan personal.

## **KAJIAN TEORI**

### **Patron–Klien**

Teori *patron–klien* merupakan hubungan sosial yang tidak setara antara dua pihak, di mana patron memiliki kekuasaan dan sumber daya, sedangkan *klien* berada pada posisi lebih lemah dan bergantung pada patron. Hubungan ini bersifat timbal balik, di mana patron memberikan bantuan atau perlindungan, sementara klien membalas dengan loyalitas dan dukungan politik. Menurut James C. Scott, relasi *patron–klien* bersifat personal dan instrumental, ditandai oleh ketimpangan kekuasaan dan loyalitas jangka panjang. Sementara itu, Peter M. Blau melihatnya sebagai hubungan pertukaran sosial yang didasarkan pada prinsip timbal balik dan keuntungan. Secara umum, hubungan ini ditandai oleh ketimpangan status, ketergantungan, dan loyalitas personal, serta sering dimanfaatkan dalam politik lokal untuk memperoleh dukungan.

### **Partisipasi politik Masyarakat**

Menurut Miriam Budiardjo, partisipasi politik mencakup keikutsertaan masyarakat dalam memilih pemimpin, memengaruhi kebijakan, mengikuti kampanye, diskusi politik, hingga aktivitas dalam organisasi politik. Sementara itu, Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson membagi partisipasi politik ke dalam beberapa bentuk, seperti voting, lobbying, aktivitas organisasi, dan pencarian koneksi politik. Dalam perkembangan demokrasi lokal, partisipasi politik masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti figur kandidat, media informasi, kondisi sosial ekonomi, serta hubungan sosial dalam masyarakat (Aspinall & Berenschot, 2019).

### **Masyarakat *Hinterland***

*Hinterland* merupakan wilayah pinggiran yang memiliki ketergantungan ekonomi, sosial, dan politik terhadap wilayah pusat (*core*), namun masih menghadapi keterbatasan pembangunan, infrastruktur, dan akses pelayanan publik (Harjanti & Rahayu, 2020). Kondisi tersebut membentuk karakter masyarakat yang memiliki hubungan sosial kuat dan ketergantungan terhadap tokoh lokal. Dalam konteks politik lokal, relasi *patron–klien* berkembang melalui pemberian bantuan, perlindungan, dan dukungan sosial dari elite lokal kepada masyarakat. Akibatnya, partisipasi politik masyarakat *hinterland* cenderung dipengaruhi oleh loyalitas personal, kedekatan sosial, dan jaringan kekuasaan lokal dibandingkan pertimbangan programatik (Aspinall & Berenschot, 2019).

### **Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)**

Pemilihan Kepala Daerah merupakan mekanisme demokrasi untuk memilih kepala daerah secara langsung oleh rakyat sebagai wujud kedaulatan rakyat di tingkat lokal. Pilkada dilaksanakan berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil) guna menjamin proses demokrasi yang transparan dan legitimatif (Budiardjo, 2019). Selain menjadi sarana pergantian kekuasaan secara damai, Pilkada juga berfungsi sebagai media partisipasi dan pendidikan politik masyarakat. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan Pilkada di tingkat lokal masih dipengaruhi oleh relasi *patron–klien*, khususnya di wilayah *hinterland*, yang turut memengaruhi pola partisipasi politik masyarakat (Hadiz, 2017; Lestari et al., 2023).

## **METODOLOGI**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial secara alamiah melalui pengamatan terhadap perilaku, interaksi, dan makna yang berkembang di masyarakat (Sugiyono,

2022). Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari individu dan perilaku yang diamati. Pendekatan ini menekankan pemahaman makna sosial secara mendalam dibandingkan pengukuran kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan masyarakat Kelurahan Bulang Lintang, Kecamatan Bulang. Wawancara dilakukan terhadap tujuh informan yang terdiri dari dua tim sukses sebagai informan kunci dan lima warga sebagai informan utama. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu berdasarkan kriteria tertentu, khususnya pihak-pihak yang terlibat dalam relasi *patron–klien* pada Pilkada 2024 (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). Kajian mengenai partisipasi politik dalam kontestasi Pemilu 2024 yang menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam politik lokal dipengaruhi oleh faktor sosial, jaringan kekuasaan, dan kedekatan dengan aktor politik (Lestari et al., 2023).

### **Sumber Data**

Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, buku, laporan penelitian, serta profil wilayah Kota Batam dan Kelurahan Bulang Lintang yang mencakup data pemilih, jumlah TPS, dan aktivitas sosial politik masyarakat terkait Pilkada 2024. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk melengkapi data primer dan sekunder (Sugiyono, 2022). Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). Pendekatan ini digunakan untuk memahami relasi *patron–klien* serta faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi politik masyarakat hinterland pada Pilkada 2024.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

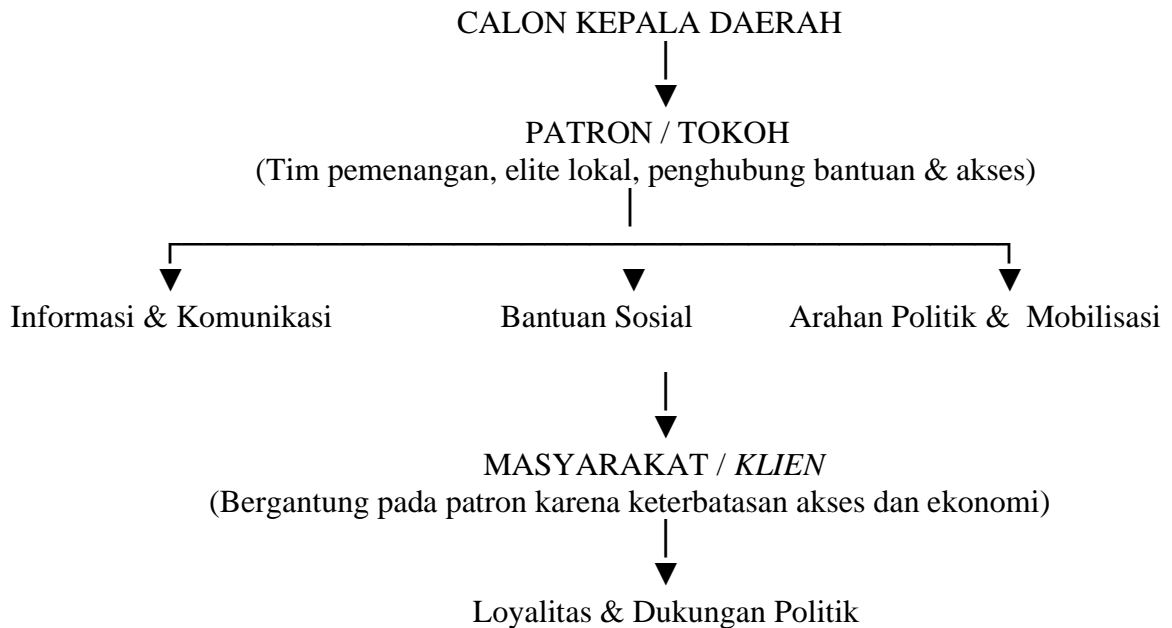
#### **Relasi Politik *Patron Klien* Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Kelurahan Bulang Lintang pada Pilkada 27 November 2024**

Pilkada serentak 27 November 2024 tidak hanya menjadi proses pemilihan kepala daerah, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial-politik lokal di Kelurahan Bulang Lintang. Partisipasi politik masyarakat masih dipengaruhi oleh hubungan personal, jaringan sosial, dan ketergantungan terhadap tokoh yang memiliki pengaruh ekonomi maupun sosial. Kondisi tersebut membentuk relasi *patron–klien*, di mana patron memberikan bantuan dan dukungan sosial, sedangkan masyarakat memberikan loyalitas dan dukungan politik. Akibatnya, pilihan politik masyarakat tidak hanya didasarkan pada visi dan program kandidat, tetapi juga dipengaruhi oleh kedekatan sosial, hubungan kekerabatan, dan kepentingan ekonomi. Relasi ini turut memengaruhi mobilisasi politik masyarakat dalam setiap tahapan Pilkada, sehingga partisipasi politik cenderung bersifat pragmatis dan transaksional.

#### **1. Ketimpangan Kekuasaan**

Hasil penelitian di Kelurahan Bulang Lintang menunjukkan adanya ketimpangan kekuasaan dalam pembentukan dan pengendalian dukungan politik menjelang Pilkada 2024. Patron berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan calon kepala daerah dengan mengendalikan informasi, komunikasi, serta distribusi bantuan. Masyarakat sebagai klien cenderung mengikuti arahan patron karena keterbatasan akses langsung kepada calon dan adanya ketergantungan sosial-ekonomi.

### **Bagan Relasi Patron–Klien dalam Pilkada 2024**



Wawancara dengan informan memperlihatkan bahwa masyarakat merasa memiliki kewajiban moral untuk membalas bantuan yang diberikan patron. Kondisi ini membuat pilihan politik lebih banyak dipengaruhi loyalitas dan hubungan personal dibanding pertimbangan rasional terhadap visi dan program calon kepala daerah. Patron mempertahankan dominasi melalui penguasaan sumber daya, jaringan sosial, serta kontrol moral, sementara klien menerima posisi subordinat sebagai bagian dari hubungan timbal balik yang tidak seimbang. Secara keseluruhan, pola hubungan *patron–klien* di Bulang Lintang memperlihatkan relasi politik yang hierarkis, asimetris, namun stabil sebagaimana dijelaskan oleh James C. Scott. Dalam konteks Pilkada 2024, kondisi ini membentuk partisipasi politik masyarakat yang pragmatis dan bergantung pada figur patron.

#### **2. Pertukaran Timbal Balik**

Ketimpangan kekuasaan merupakan ciri utama relasi patron–klien sebagaimana dikemukakan oleh James C. Scott. Ketimpangan ini muncul dari perbedaan posisi sosial, ekonomi, serta akses terhadap sumber daya politik antara patron dan klien. Patron memiliki jaringan, pengaruh, dan kedekatan dengan aktor politik, sementara klien berada pada posisi bergantung, sehingga relasi ini kerap dianggap wajar dalam kehidupan sosial.

Hasil penelitian di Kelurahan Bulang Lintang menunjukkan bahwa patron berperan dominan dalam membentuk dan mengendalikan dukungan politik menjelang Pilkada 2024. Patron berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan calon kepala daerah serta mengontrol informasi, komunikasi, dan distribusi bantuan, sehingga preferensi politik masyarakat lebih dipengaruhi arahan patron daripada pertimbangan mandiri.

Ketimpangan ini diperkuat oleh keterbatasan ekonomi, akses informasi, serta norma sosial balas budi yang menciptakan loyalitas politik. Bantuan yang diterima

membentuk tekanan sosial sehingga pilihan politik masyarakat cenderung mengikuti patron. Secara keseluruhan, patron diposisikan sebagai aktor dominan, sedangkan masyarakat berada pada posisi subordinat. Relasi ini bersifat asimetris namun stabil karena ditopang oleh kontrol sumber daya, jaringan sosial, dan loyalitas, yang pada akhirnya membentuk partisipasi politik yang pragmatis dalam Pilkada 2024.

### 3. Hubungan Personal dan berkelanjutan

James C. Scott menjelaskan bahwa relasi *patron–klien* terbentuk melalui hubungan personal yang bersifat informal, langsung, dan berlangsung terus-menerus. Hubungan ini didasarkan pada kedekatan sosial, rasa percaya, serta ikatan moral yang terbangun dalam interaksi jangka panjang. Dalam politik elektoral, hubungan *patron–klien* juga dapat dijalankan melalui perantara yang memiliki pengaruh dan legitimasi di tengah masyarakat. Hasil penelitian di Kelurahan Bulang Lintang menunjukkan bahwa relasi *patron–klien* pada Pilkada 2024 dipengaruhi oleh kuatnya jaringan sosial lokal dan peran tokoh masyarakat maupun tim sukses sebagai perantara politik. Meskipun calon kepala daerah tidak selalu berinteraksi langsung dengan warga, kedekatan politik tetap terbentuk melalui komunikasi yang dibangun oleh para perantara tersebut. Tokoh masyarakat dan tim sukses berperan dalam menyampaikan pesan politik, memperkenalkan figur calon, serta membangun kepercayaan masyarakat. Interaksi yang berlangsung secara intens dan berulang menunjukkan bahwa relasi *patron–klien* terbentuk melalui proses sosial yang berkelanjutan dan telah mengakar dalam kehidupan masyarakat.

### 4. Ketergantungan Klien terhadap Patron

Hasil penelitian di Kelurahan Bulang Lintang menunjukkan bahwa relasi *patron–klien* pada Pilkada 2024 dipengaruhi oleh kondisi ekonomi masyarakat hinterland yang masih terbatas. Sebagian besar warga bekerja di sektor informal, seperti nelayan, buruh harian, dan pekerjaan serabutan dengan pendapatan yang tidak menentu. Kondisi ini membuat masyarakat bergantung pada pihak yang memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya ekonomi dan sosial. Dalam hubungan tersebut, patron dipandang sebagai pihak yang mampu memberikan bantuan ekonomi, perlindungan sosial, maupun akses tertentu, sedangkan masyarakat sebagai klien memberikan loyalitas dan dukungan politik. Hubungan ini terbentuk secara informal melalui interaksi sosial dan praktik saling membantu yang berlangsung terus-menerus.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap patron, termasuk elit politik dan tim sukses, cukup tinggi akibat keterbatasan ekonomi dan akses terhadap bantuan pemerintah. Kondisi tersebut membentuk pola partisipasi politik yang pragmatis dan tidak sepenuhnya mandiri. Sejalan dengan pandangan James C. Scott, selama ketergantungan ekonomi masih berlangsung, patron akan tetap memiliki pengaruh besar dalam menentukan pilihan politik masyarakat.

### 5. Loyalitas Jangka Panjang

Loyalitas politik klien merupakan salah satu ciri khas utama dalam relasi *patron–klien*, sebagaimana dijelaskan James C. Scott (1972). Scott menekankan bahwa hubungan ini dibangun melalui pertukaran timbal balik yang tidak selalu bersifat material, seperti uang atau barang, tetapi juga dalam bentuk perhatian, perlindungan, dan dukungan sosial. Dalam konteks ini, klien membalas peran patron melalui kepatuhan, kesetiaan, dan

dukungan politik. Hubungan tersebut muncul sebagai konsekuensi dari ketimpangan posisi sosial, ekonomi, dan pengaruh, sehingga menimbulkan ketergantungan yang bersifat personal dan berkelanjutan. Temuan penelitian di Kelurahan Bulang Lintang pada Pilkada Tahun 2024 menunjukkan bahwa loyalitas politik masyarakat cukup kuat dan relatif stabil.

### **Bentuk Partisipasi Politik**

Bentuk partisipasi politik masyarakat Kelurahan Bulang Lintang dalam Pilkada Tahun 2024 dapat dianalisis terlebih dahulu melalui tingkat kehadiran pemilih dalam menggunakan hak pilihnya. Tingkat partisipasi ini menjadi indikator awal untuk menilai sejauh mana masyarakat terlibat secara nyata dalam proses politik elektoral, khususnya dalam konteks pemilihan kepala daerah sebagai arena demokrasi lokal. Berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kelurahan Bulang Lintang pada Pilkada Tahun 2024 yang dirilis oleh KPU Kota Batam, jumlah pemilih terdaftar sebanyak 1.274 orang, terdiri atas 654 pemilih laki-laki dan 620 pemilih perempuan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 929 orang tercatat menggunakan hak pilihnya, dengan rincian 451 pemilih laki-laki dan 478 pemilih perempuan.

**Tabel 7**

#### **Partisipasi Pemilih Kelurahan Bulang Lintang pada Pilkada Tahun 2024**

<b>Keterangan</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
Daftar Pemilih Tetap	654	620	1.274
Pengguna Hak Pilih	451	478	929

Sumber: KPU Kota Batam, 2026

Berdasarkan data Pilkada 2024, tingkat partisipasi politik masyarakat Kelurahan Bulang Lintang mencapai sekitar 72,9 persen, yaitu 929 pemilih dari total 1.274 DPT. Angka ini tergolong tinggi, terutama karena wilayah Bulang Lintang merupakan kawasan *hinterland* dengan keterbatasan akses geografis, transportasi, serta kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Tingginya partisipasi ini menunjukkan keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi lokal. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi politik tersebut tidak sepenuhnya didasarkan pada kesadaran politik yang mandiri dan rasional, melainkan masih dipengaruhi oleh relasi *patron-klien*, tokoh masyarakat, faktor ekonomi, serta solidaritas sosial yang kuat di lingkungan setempat. Patron dan tokoh lokal memiliki pengaruh besar dalam membentuk pilihan politik masyarakat melalui hubungan sosial dan pertukaran kepentingan. Selain dalam bentuk pemberian suara, partisipasi politik juga tampak dalam keterlibatan pada kampanye, pertemuan politik, serta keikutsertaan dalam tim sukses atau kelompok kepentingan. Dengan demikian, meskipun tingkat partisipasi tergolong tinggi secara kuantitatif, kualitas dan motivasi partisipasi politik masyarakat masih perlu dianalisis lebih mendalam untuk memahami dinamika politik lokal di wilayah tersebut.

**Tabel 8**
**Tabel Ringkasan Bentuk Partisipasi Politik di Kelurahan Bulang Lintang**

No.	Bentuk Partisipasi	Pola yang Terjadi	Faktor Dominan	Karakter Partisipasi
1.	Kelompok kepentingan (tim sukses, simpatisan, jaringan partai)	Mobilisasi oleh elite dan tokoh lokal	Ekonomi, kedekatan sosial, <i>patron–klien</i>	Pragmatis, transaksional, jangka pendek
2.	Mengikuti kampanye politik	Partisipasi informatif dan harapan layanan publik	Janji kandidat, kebutuhan infrastruktur	Rasional-pragmatis berbasis relasi sosial
3.	Memberikan suara ( <i>voting behavior</i> )	Patronase politik dan loyalitas personal	Tokoh lokal, bantuan sosial, kedekatan emosional	Loyalitas berbasis patronase, tidak sepenuhnya rasional

Sumber: Olah data oleh peneliti, 2026

### Faktor Pendorong Partisipasi Politik

Partisipasi politik masyarakat di Kelurahan Bulang Lintang dipengaruhi oleh relasi *patron–klien* yang berkembang dalam kehidupan sosial masyarakat hinterland. Patron memiliki pengaruh melalui akses sumber daya, jaringan sosial, dan bantuan ekonomi, sedangkan masyarakat sebagai klien cenderung memberikan dukungan politik berdasarkan loyalitas dan hubungan sosial. Akibatnya, partisipasi politik tidak sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan rasional terhadap visi dan program kandidat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama pendorong partisipasi politik masyarakat meliputi pengaruh tokoh lokal, hubungan kekeluargaan, ketergantungan ekonomi, serta adanya bantuan dan perhatian dari kandidat maupun tim sukses. Faktor-faktor tersebut membentuk pola partisipasi politik yang pragmatis dan relasional, di mana pilihan politik masyarakat lebih dipengaruhi oleh kedekatan sosial dan harapan manfaat jangka pendek dibandingkan evaluasi terhadap kapasitas kandidat.

#### 1. Pengaruh Hubungan *Patron-Klien*

Salah satu faktor utama yang mendorong partisipasi politik masyarakat hinterland di Kelurahan Bulang Lintang adalah kuatnya relasi *patron–klien* antara elite politik dan masyarakat. Keterbatasan ekonomi serta minimnya akses pelayanan publik membuat masyarakat bergantung pada patron yang dianggap mampu memberikan bantuan dan solusi terhadap kebutuhan warga. Akibatnya, partisipasi politik masyarakat tidak hanya didasarkan pada kepentingan politik, tetapi juga harapan terhadap keberlanjutan bantuan setelah Pilkada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi *patron–klien* menjadi faktor dominan dalam mendorong partisipasi politik masyarakat. Partisipasi lebih dipengaruhi oleh kebutuhan ekonomi dan harapan praktis dibandingkan kesadaran politik yang kritis dan mandiri. Kondisi ini mencerminkan pola partisipasi politik yang pragmatis dan hierarkis, di mana elite politik berada pada posisi dominan, sementara masyarakat berada dalam posisi bergantung.

## 2. Dorongan Ekonomi dan Sosial

Selain relasi *patron–klien*, partisipasi politik masyarakat hinterland di Kelurahan Bulang Lintang juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan lingkungan sosial. Keterbatasan ekonomi, seperti pendapatan yang tidak menentu dan ketergantungan pada bantuan, membuat masyarakat melihat Pilkada sebagai kesempatan memperoleh bantuan dan perhatian dari aktor politik. Akibatnya, bantuan material dan janji politik lebih mudah memengaruhi pilihan masyarakat dibandingkan visi dan program kandidat. Lingkungan sosial juga berpengaruh kuat melalui ikatan kekeluargaan, solidaritas warga, dan pengaruh tokoh masyarakat. Rasa sungkan dan keinginan menjaga hubungan sosial membuat pilihan politik sering bersifat kolektif. Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat lebih banyak didorong oleh kebutuhan praktis dan tekanan sosial dibandingkan kesadaran politik yang kritis dan mandiri.

## 3. Pengaruh Tokoh Lokal dan Jaringan Kekeluargaan

Partisipasi politik masyarakat hinterland di Kelurahan Bulang Lintang dipengaruhi kuat oleh peran tokoh lokal dan jaringan kekeluargaan. Tokoh lokal memiliki pengaruh besar karena dianggap dekat dengan masyarakat serta aktif membantu kebutuhan sosial dan administrasi warga. Kepercayaan yang terbangun membuat masyarakat cenderung mengikuti arahan politik tokoh tersebut sebagai bentuk penghormatan dan menjaga hubungan sosial. Selain itu, jaringan kekeluargaan membentuk pola partisipasi politik yang bersifat kolektif. Pilihan politik sering dipengaruhi oleh diskusi keluarga dan arahan anggota keluarga yang lebih tua. Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat lebih banyak dibentuk oleh hubungan sosial, kepercayaan, dan solidaritas komunitas dibandingkan pertimbangan politik yang sepenuhnya individual.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, relasi *patron–klien* masih menjadi faktor utama yang memengaruhi perilaku politik masyarakat hinterland di Kelurahan Bulang Lintang pada Pilkada 2024. Relasi tersebut terlihat melalui pemberian bantuan material, seperti uang, sembako, dan fasilitas umum, serta bantuan non-material berupa janji politik yang membentuk hubungan timbal balik antara kandidat dan masyarakat. Kondisi ekonomi masyarakat yang mayoritas bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan tidak tetap turut memperkuat ketergantungan terhadap aktor politik dan tokoh lokal. Relasi *patron–klien* juga memengaruhi tingginya partisipasi politik masyarakat yang mencapai sekitar 72,9%. Masyarakat terlibat dalam kampanye, tim sukses, dan penggunaan hak pilih, namun partisipasi tersebut cenderung pragmatis karena lebih dipengaruhi oleh hubungan sosial, kepentingan ekonomi, dan arahan tokoh lokal dibandingkan pertimbangan visi dan program kandidat. Secara umum, pola *patron–klien* masih berperan kuat dalam dinamika politik lokal wilayah hinterland dan berpotensi menurunkan kualitas demokrasi substantif.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian, relasi *patron–klien* masih berpengaruh kuat terhadap partisipasi politik masyarakat hinterland pada Pilkada 2024 di Kelurahan Bulang Lintang, Kecamatan Bulang. Partisipasi politik masyarakat masih dipengaruhi oleh loyalitas, kedekatan sosial, dan hubungan emosional dengan tokoh *patron*, sehingga pilihan politik belum sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan rasional terhadap program kandidat. Adapun saran penelitian ini sebagai berikut:



1. Pemerintah dan penyelenggara pemilu perlu meningkatkan pendidikan politik masyarakat hinterland agar partisipasi politik lebih kritis dan demokratis.
2. Tokoh masyarakat dan aktor politik diharapkan mendorong budaya politik yang lebih terbuka dan mandiri.
3. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran politik agar lebih rasional dalam menentukan pilihan politik.
4. Penelitian selanjutnya diharapkan mengkaji pengaruh media sosial, politik uang, dan elit lokal dalam relasi patron–klien masyarakat hinterland.

## REFERENSI

- Alpikri, A., & Lestari, L. (2017). Marketing Politik Pemenangan Jokowi-JK Pada Pemilihan Presiden Tahun 2014. *Jurnal Trias Politika*, 1(1).
- Aspinall, E. & Berenschot, W. (2019). *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia*. Cornell University Press.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Downs, A. (1957). *An Economic Theory of Democracy*. Harper.
- Hicken, A. (2021). “Clientelism and Democratic Accountability.” *Annual Review of Political Science*.
- Lestari, L., Lumbantobing, I. ., & Johar, S. . (2015). Political Behavior of Beginner Votersin Mayor Election Batam 2015 at Sagulung Kota. *Journal of Techno Social*, 10(2), 11–16.
- Lestari, L., Fathani, A. T., & Damin, Z. A. (2023). *Preparation for Indonesian Election 2024: Women’s Participation in Political Contest*. *Journal of Governance*, 8(2), 197–212. <https://doi.org/10.31506/jog.v8i2.19045>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Muhtadi, B. (2020). *Vote Buying in Indonesia: The Mechanics of Electoral Bribery*. Palgrave Macmillan.
- Scott, J. C. (1972). Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia. *The American Political Science Review*, 66(1), 91–113.
- Undang-Undang (UU) No. 10 Tahun 2016 (2016).
- Undang-Undang (UU) No. 8 Tahun 2015 (2015).